

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, UU Desa telah diterapkan secara cukup efektif di Desa Sisumut, terutama dalam hal pembentukan kelembagaan desa, pengelolaan dana desa, serta pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Desa telah menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur, termasuk melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga pelaksanaan pembangunan namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan terbukti karena hanya 30 sampai 40% saja dari masyarakat yang hadir. Partisipasi terlihat kurang dalam kegiatan musyawarah begitu juga pada kegiatan fisik seperti gotong royong. Partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif, terbatas pada kelompok tertentu, dan belum menjangkau seluruh lapisan seperti pemuda, perempuan, dan kelompok marginal (masyarakat kurang mampu).
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut adalah, adapun faktor pendukungnya ialah karena adanya regulasi yang jelas dari UU No. 3 Tahun 2024 sebagai pedoman pembangunan desa, ketersediaan dana desa yang mendukung pelaksanaan pembangunan secara konkret, dan perangkat desa yang aktif dan relatif

memahami tugasnya sesuai amanat Undang-Undang. sedangkan adapun faktor hambatannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi UU Desa, termasuk hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa, budaya apatis dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan, dan ketimpangan akses informasi, di mana informasi pembangunan belum menjangkau seluruh lapisan warga desa secara merata.

3. Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* tentang efektivitas UU No. 3 Tahun 2024

Tentang Desa terhadap keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut adalah situasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam seperti *Syura* (musyawarah), *'adilah* (keadilan), dan *Maslahah 'ammah* (kepentingan umum) belum terwujud secara optimal. Musyawarah yang dilakukan masih cenderung elitis, partisipasi belum merata, dan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap jalannya pembangunan desa belum berjalan secara efektif. Pemimpin desa sebagai pemegang amanah seharusnya mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara aktif dan merata, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Dengan demikian, efektivitas UU Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sisumut dinilai belum maksimal jika dilihat dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyyah*. Diperlukan penguatan nilai-nilai partisipatif yang tidak hanya bersifat administratif melainkan juga menyentuh kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial seluruh elemen masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa hendaknya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan desa, agar prinsip syura dapat diwujudkan secara inklusif dan tidak terbatas pada tokoh-tokoh tertentu saja.
2. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam forum-forum musyawarah dan kegiatan pembangunan harus lebih difasilitasi, sebagai bentuk penerapan nilai keadilan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.
3. Perangkat desa dan BPD perlu membuka ruang dialog yang lebih luas, serta menciptakan mekanisme pengawasan partisipatif agar masyarakat turut serta dalam mengontrol jalannya pembangunan dan penggunaan dana desa.
4. Pembinaan spiritual Tokoh Agama dan moralitas kepemimpinan desa penting dilakukan agar para pemimpin benar-benar memahami kedudukannya sebagai *Ra'in* (penggembala) yang bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakat, bukan hanya menjalankan tugas administratif.
5. Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan, terutama yang mengkaji implementasi UU Desa dengan pendekatan Islam atau *Siyasah Dusturiyyah* di desa-desa lain, guna memperkaya wawasan tentang integrasi nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. (2018). *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*. Ponorogo: Wade Group.
- Adi, Isbandi rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Terj. A. Fattah Santoso. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *Fiqh Daulah: Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Al Zuhaili, Wahbah. (1995). *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya.
- A.Suhaenah Suparno. (2001). *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Davis, K. (1981). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Depertemen Agama RI. (2014). *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Eko, Sutoro. (2016). *Membangun Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Firmansyah M. (2019). *Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal*, Institut Agama Islam Negeri.
- Gibson,L.J. (2000). *Organisasi*, Terjemahan, Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Ahmad. (2005). *Prinsip-prinsip Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrajit, Soimin. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, Jakarta: Instans Publishing.
- Irawan Soehartono. (1995). *Metode-Metode Penelitian sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1995). *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Hasbullah Bakry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu:yogyakarta.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Melisa. (2016). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Wawolesea Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*. Skripsi Universitas Halu Oleo.
- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muawiyah, *Kolerasi Antara Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas pembangunan Desa di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringn Timur*. Skripsi Institut Agama Islam Palangkaraya, (2021).
- Mubyarto. (1991). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi, Hadari. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oktaria Yelien. (2002). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Persfektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pradikta Y. P, Rinaldi M. E, (2021). "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal AsSiyasi, Vol. 1 No. 1.
- Pulungan, Suyuthi J. (2014). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. (2000). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Terj. Amir Hamzah. Jakarta: Gema Insani.
- Ravianto J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

- Sendy, A.A. (2020). 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau', *SELL Journal*, Vol. 5 No. 1.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar, Nur Fitriyani. (2018). *Efektivitas Hukum*. Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat, Vol. 18 No. 2.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetoro, Endri. (2012). *Pembangunan Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Student Library.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company.
- Sugiyono. (2006). *metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. (1995). *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsito.
- Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.UM Press.
- Suyanto, Bagong. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zallum, Abdul Qadim. (2001). *Nidzam al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam). Terj. Tim HTI. Jakarta: Al-Izzah.
- Wayanti, (2016). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna*. Skripsi Universitas Haluoleo.
- Wibawa. S. C. K. (2019). *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 1.
- Widodo, Joko. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.